

## KELEMBAGAAN SASI LOMPA DAN IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH)

### *The Institutional of Sasi Lompa and Its Implication (Case Studies in Haruku Village Maluku Tengah Regency)*

Yoisy Lopolalan<sup>1\*</sup> dan James Abrahamsz<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Pascasarjana Universitas Pattimura

[lopuois21@gmail.com](mailto:lopuois21@gmail.com), [james.abrahamsz@fpik.unpatti.ac.id](mailto:james.abrahamsz@fpik.unpatti.ac.id)

Corresponding author\*

**ABSTRAK:** Salah satu kearifan lokal dari masyarakat Negeri Haruku Maluku Tengah adalah *sasi lompa*. Dalam pelaksanaannya, peran lembaga adat sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kelembagaan *sasi lompa* di Negeri Haruku. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2020 di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penilaian indikator EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Sebanyak 35 responden sebagai sampel penelitian dipilih secara purposif. Hasil analisis terhadap indikator kelembagaan *sasi lompa* di Negeri Haruku memperlihatkan bahwa indikator tingkat kepatuhan terhadap prinsip perikanan yang bertanggung jawab tergolong kurang; sementara indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan dan rencana pengelolaan perikanan serta pemangku kepentingan tergolong sedang. Indikator mekanisme kelembagaan pengelolaan perikanan sangat bervariasi, sedangkan indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan dinilai sangat baik, dan merupakan prioritas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan *sasi lompa* di Negeri Haruku.

**Kata Kunci:** Kelembagaan, pengelolaan, *sasi lompa*, EAFM, Negeri Haruku

**ABSTRACT:** One local wisdom of the Haruku community is *sasi lompa*. In practice, the role of traditional institutions is vital. This study aims to analyze the institutional status of *sasi lompa* in Haruku. This research was conducted in July 2020 in Haruku Village, Maluku Tengah Regency. Data were collected using observation, interview, and documentation methods. A descriptive qualitative with the EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management) indicator assessment approach was applied to answer the problem. A total of 35 respondents as samples were collected purposively. The results show that the adherence level to responsible fisheries principles is poor; meanwhile, indicators of the completeness of the rules in fisheries management and fisheries management plans and stakeholders are classified as average. Indicators of institutional mechanisms for fisheries management varied widely, while the policy and institutional cooperative levels were considered very good. The latter is the priority in enhancing the institutional capacity of *sasi lompa* in Haruku.

**Keywords:** Institutional, management, *sasi lompa*, EAFM, Haruku Village



## PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan perikanan di Indonesia telah mengadopsi konsep pendekatan ekosistem pada perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries*) atau EAFM (Garcia *et al.*, 2003; Puspasari, *et al.*, 2014). Sesuai definisi dan prinsip pendekatan ekosistem pada perikanan, maka implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem EAFM di Indonesia, memerlukan adaptasi struktural maupun fungsional di seluruh tingkat pengelolaan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah (NWG-EAFM, 2014). Implementasi EAFM memerlukan perangkat indikator yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi tentang penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Gaichas, 2008; Mulyana, 2018). NWG-EAFM (2014) menetapkan enam domain dalam EAFM: sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan ikan, sosial ekonomi serta kelembagaan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem, merumuskan EAFM sebagai pendekatan pengelolaan yang menitikberatkan pada pentingnya keterkaitan (konektivitas) sumberdaya ikan dan komponen ekosistem perairan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Aspek kelembagaan memiliki peran penting bagi terselenggaranya pengelolaan perikanan di setiap wilayah pengelolaan perikanan (Gazali, 2019). Posisi penting kelembagaan tergambar dari dua nilai yang dikandungnya, sistem nilai atau norma dan organisasi. Kajian penting kelembagaan dalam pengelolaan perikanan bertujuan untuk mengetahui efektivitas tidak pengelolaan pada kondisi dan penyebab terjadinya (Abrahamsz&Wurlianty, 2015). Dalam konteks dinamika kelembagaan, identifikasi tentang masalah dan isu pengelolaan perikanan, serta respons kelembagaan terhadap persoalan tersebut dipandang penting untuk memecahkan berbagai masalah pengelolaan perikanan (Yusuf *et al.*, 2018).

Salah satu keanekaragaman budaya dari masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku

adalah “*Sasi*”. Ketentuan hukum adat tentang *sasi* memuat tiga hal pokok yang menarik. *Pertama*, *sasi* memuat unsur larangan memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka waktu tertentu (Persada *et al.*, 2018). Lebih jauh lagi dalam *sasi* terselip adanya pengkaitan ketentuan adat dengan pelestarian kemampuan lingkungan hidup. *Kedua*, ketentuan *sasi* tidak hanya mencakup lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial (Kusumadinata, 2015). *Ketiga*, ketentuan hukum *sasi* ditentukan oleh masyarakat pendiri dari bawah, atas prakarsa masyarakat sendiri serta pengawasan atas pelaksanaannya pun diselenggarakan oleh masyarakat (Asrul *et al.*, 2017). Berdasarkan tiga hal pokok tersebut terlihat bahwa kearifan masyarakat yang sejak dahulu (kurang lebih abad ke-17 telah diterapkannya *sasi*) telah berwawasan lingkungan.

Kearifan masyarakat seperti budaya *sasi* di Maluku, salah satunya dapat ditemukan di Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai suatu negeri yang terletak di wilayah pesisir, secara langsung mengindikasikan bahwa masyarakat pada wilayah tersebut cenderung memanfaatkan sumberdaya kawasan pesisir dan laut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumberdaya ikan yang menjadi tujuan pelaksanaan *sasi* di Negeri Haruku adalah ikan lompas (*Thryssa baelama*). *Sasi lompas* dilestarikan oleh lembaga adat yaitu *Raja, Kepala Soa, Saniri, Kewang* dan *Marinyo* (Alvayedo&Erliyana, 2022). Lembaga kewang berperan dalam menjaga serta melindungi segala sumberdaya yang *disasi*.

Fokus penelitian ini adalah penilaian status indikator kelembagaan pada sumberdaya ikan lompas berbasis kearifan lokal di Negeri Haruku. Sistem kelembagaan yang masih sederhana dengan eksistensi kelembagaan yang harus diinisiasi dengan cepat juga merupakan kebutuhan untuk mendukung kelembagaan pada sumberdaya. Sejauhmana domain kelembagaan pada sumberdaya berbasis kearifan lokal, menjadi pertanyaan serius yang penting untuk dijawab. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah adanya kebutuhan penataan kelembagaan secara komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kelembagaan *sasi lompas* di Negeri Haruku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari hingga Juli 2020. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus yang merupakan penelitian tentang keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus (Achmadi&Narbuko, 2009). Tujuan studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun status individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu *pertama*: observasi penelitian dilakukan sebelum pengambilan data di Negeri Haruku. Hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun instrumen penelitian. *Kedua*: wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data (responden). *Ketiga*: dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah serta organisasi lainnya seperti Kantor Negeri Haruku.

Pengambilan sampel pada proses wawancara menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Sampel yang diambil sebanyak 35 responden meliputi *pertama*: seorang pemangku adat dan “kepala kewang laut” yang memahami permasalahan ritual hukum adat yang berkaitan dengan eksistensi *sasi* dalam melindungi kelestarian ikan lompa (*Thryssa baelama*) yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai *key informant*. *Kedua*: Seorang Raja (Kepala Pemerintah Negeri) yang merupakan kelembagaan formal yang menjaga, melindungi, dan menertibkan masyarakatnya dan ikut serta dalam terlaksananya hukum adat *sasi*. *Ketiga*: 32 (tiga puluh dua) orang masyarakat yang bermukim di daerah kawasan *sasi*.

### Metode Analisis Data

Analisis status kelembagaan difokuskan pada indikator kelembagaan (Tabel 1), dan menggunakan metode analisis EAFM (NWG-EAFM, 2014). Penilaian terhadap tiap indikator, masing-masing dengan kriteria dan bobot penilaian (NWG-EAFM, 2014; Ninef *et al.*, 2019). Analisis keragaan EAFM perikanan di kawasan ini menggunakan indeks komposit. Tahapan analisis mengacu pada Ninef *et al.* (2019):

1. Pemberian skor pada setiap indikator dalam skala Likert berbasis ordinal 1,2,3.
2. Perhitungan indeks komposit dengan model:  

$$CA_i = f(CA_{n1} \dots n=1,2,3 \dots m)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Indikator Kepatuhan

Indikator ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *sasi lompa* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *sasi lompa* dan telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal atau adat (NWG-EAFM, 2014). Analisis indikator kepatuhan bertujuan mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan main secara formal dan informal dalam pengelolaan *sasi lompa*. Selanjutnya, jika semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan berdampak terhadap semakin tinggi efektivitas pengelolaan, sehingga diperoleh efektivitas pengelolaan *sasi lompa* yang dinamis.

Hasil penelitian menunjukkan indikator kepatuhan memiliki skor 1 pada indikator non-formal (Tabel 2). Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Pencatatan pelanggaran pada pengelolaan *sasi lompa* ditemukan pada lokasi penelitian sebanyak 20 pelanggaran yang terdistribusi pada 6 responden. Kategori pelanggaran yang teridentifikasi meliputi: membuang jaring sebelum waktunya, kondisi *speed boat* dalam keadaan menyala saat masuk *labuang*, pembusian ikan, dan pengambilan ikan untuk dijadikan sebagai umpan. Gazali (2019) menemukan pelanggaran yang terjadi pada berbagai level, baik penggunaan alat tangkap merusak hingga pada kepemilikan ijin.

Tabel 1. Indikator kelembagaan dalam EAFM

Indikator	Kriteria
Kepatuhan	1 = lebih dari 5 informasi pelanggaran, 2 = lebih dari 3 informasi pelanggaran, 3 = tidak ada informasi pelanggaran
Kelengkapan Aturan Main dalam Pengelolaan Perikanan	1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak lengkap; 3 = ada dan lengkap elaborasi untuk poin 2 1 = ada tapi jumlahnya berkurang; 2 = ada tapi jumlahnya tetap; 3 = ada dan jumlahnya bertambah
Mekanisme Pengambilan Keputusan	1 = tidak ada mekanisme kelembagaan; 2 = ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif; 3 = ada mekanisme kelembagaan dan berjalan efektif 1 = ada keputusan tapi tidak dijalankan; 2 = ada keputusan tidak sepenuhnya dijalankan; 3 = ada keputusan dijalankan sepenuhnya
Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)	1 = belum ada RPP; 2 = ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan; 3 = ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya
Tingkat Sinergisitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan	1 = konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan); 2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif; 3 = sinergi antar lembaga berjalan baik 1 = terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 2 = kebijakan tidak saling mendukung; 3 = kebijakan saling mendukung
Kapasitas Pemangku Kepentingan	1 = tidak ada peningkatan; 2 = ada tapi tidak difungsikan; 3 = ada dan difungsikan

Sumber: Abrahamsz & Wurlianty, 2015

Tabel 2. Indikator kepatuhan

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor (1-3)	Kondisi di Lapangan
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Sasi Ikan Lompa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (alat)	Tingkat kepatuhan seluruh pemangku kepentingan lembaga adat terhadap aturan main baik formal maupun non formal	Wawancara/kuesioner ( <i>key person</i> ) terhadap pelanggaran non formal termasuk ketepatan maupun peraturannya	lebih dari 5 informasi pelanggaran lebih dari 3 informasi pelanggaran tidak ada informasi pelanggaran	1 2 3	1

Sumber: Data primer diolah, 2020

Secara umum, hasil tersebut memberikan adanya dinamika pelanggaran secara spasial maupun temporal. Secara spasial, kawasan dengan tingkat pelanggaran paling tinggi adalah

di hilir sungai tempat dilaksanakannya *sasi*. Secara temporal, penurunan pelanggaran terjadi setiap tahun. Walaupun demikian, tingkatan pelanggaran termasuk dalam kategori sangat

tinggi jika disesuaikan dengan kriteria penilaian. Dalam satu tahun terakhir, pelanggaran formal yang terjadi sebelum kegiatan *sasi lompa* berlangsung sebanyak 4 kali, sedangkan pelanggaran non-formal sebanyak 20 kali dari masyarakat sekitar lokasi *sasi*. Perilaku ilegal dalam pengelolaan *sasi lompa* terjadi karena rendahnya kewajiban moral dan pengaruh sosial, serta orientasi biaya konvensional dan pendapatan. Upaya komunikasi otoritas pengelola dengan pengguna sumberdaya tentang kepatuhan berhasil mempertahankan tingkat kepatuhan (Arias&Sutton, 2013). Pengguna sumberdaya diharapkan mematuhi aturan-aturan pengelolaan dan dikontrol melalui mekanisme yang sah. Pada kondisi ini, adopsi aturan pengelolaan akan berjalan dengan baik karena meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan *sasi lompa*. Keikutsertaan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan serta manfaat *sasi* sangat berdampak positif terhadap keberlanjutan sumberdaya alam (Renjaan *et al.*, 2013)

#### Indikator Kelengkapan Aturan Main Dalam Pengelolaan Sasi Lompa

Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan *sasi lompa* menunjukkan bahwa

semakin lengkap aturan maka semakin baik kelembagaan pengelolaan *sasi lompa*, sehingga akan semakin efektif pengelolaan *sasi lompa* tersebut (NWG-EAFM, 2014). Indikator kelengkapan aturan main memiliki skor 2 yang dibagi dalam dua bagian penjelasan yaitu sejauh mana kelengkapan regulasi dalam pengelolaan *sasi* ikan lompa dan ada atau tidaknya penegakan aturan main dan efektivitasnya (Tabel 3). Bagian pertama menjelaskan adanya aturan *sasi lompa* di Negeri Haruku namun belum efektif karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Karepesina *et al.*, 2013). Pendekatan hukum terkait *sasi lompa* telah berjalan namun masih dilakukan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi aturan formal di daerah yang terkait dengan pengelolaan *sasi lompa* belum ada, kecuali pengaturan secara makro dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pada tingkat masyarakat dan kawasan *sasi* telah ditetapkan keputusan raja negeri tentang pelanggaran penangkapan ikan ataupun akibat aktivitas dalam bentuk apapun di daerah *sasi lompa*. Selain itu ditetapkan pula aturan penggunaan obat bius dalam melakukan penangkapan ikan di kawasan *sasi*.

Tabel 3. Indikator kelengkapan aturan main

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor	Kondisi di Lapangan
Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa	Sejauh mana kelengkapan regulasi dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa	1. <i>Benchmark</i> sesuai dengan peraturan nasional. 2. Membandingkan situasi sekarang dengan yang sebelumnya 3. Replikasi kearifan lokal	tidak ada	1	2
			ada tapi tidak lengkap	2	
			ada dan lengkap	3	
Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa	Ada atau tidak penegakan aturan main dan efektivitasnya	Survei dilakukan melalui wawancara/kuesioner : 1. Ketersediaan adat, orang 2. Bentuk dan intensitas penindakan (teguran, hukum)	ada tapi jumlahnya berkurang	1	3
			ada tapi jumlahnya tetap	2	
			ada dan jumlahnya bertambah	3	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Regulasi yang ditetapkan tersebut hanya mengatur pengendalian pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan, sehingga teridentifikasi keterkaitan kuat dengan eksistensi aturan-aturan formal tersebut, yakni domain sumberdaya ikan serta habitat dan ekosistem. Namun demikian, pengaturan tentang sumberdaya ikan masih lemah. Implementasi aturan-aturan pengelolaan *sasi lompa* masih terbatas pada penggunaan aturan-aturan yang berlaku secara nasional. Hal ini menyebabkan hingga tahun 2015 belum adanya penambahan regulasi baru di daerah yang terkait dengan pengelolaan *sasi lompa* secara komprehensif.

Dalam konteks penegakan aturan main, hanya aturan adat yang memainkan peran penting, terutama dalam konteks pelanggaran pemanfaatan yang merusak artinya walaupun ada upaya penegakan aturan main, namun belum menunjukkan adanya efektivitas penegakan aturan. Hal ini terbukti bahwa hingga tahun 2017 masih adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan pada daerah *sasi* yang bersifat merugikan. Kondisi tersebut menyebabkan peran *kewang* lebih kuat dibanding tenaga pengawas yang disediakan oleh pemerintah setempat. Kuatnya peran *kewang* tergambar dari adanya teguran dan penjelasan-penjelasan yang diberikan terhadap para pelanggar, khususnya tentang eksistensi *sasi lompa* dan pentingnya perlindungan di kawasan *sasi*. Dinamika kelembagaan dalam pengelolaan *sasi lompa* di Negeri Haruku pada konteks kelengkapan aturan main saat ini sangat ditentukan oleh eksistensi aturan main yang masih kurang, penegakan hukum yang lemah dan hanya didukung oleh peran masyarakat adat. Peraturan yang lengkap menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Kelengkapan peraturan secara otomatis dapat terimplementasi dengan baik (Gazali, 2019).

### **Indikator Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Penilaian indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan *sasi lompa*. Pengambilan keputusan yang tidak didukung dengan tata kelola *sasi lompa* yang benar dan prinsip-prinsip *sasi lompa*

yang bertanggung jawab akan berdampak negatif bagi masa depan *sasi lompa* (NWG-EAFM 2014). Penilaian indikator mekanisme pengambilan keputusan (Tabel 4) berada pada skor 2 dan 3 yang dibagi dalam tiga bagian penjelasan. *Pertama*; setiap pelanggaran yang dilakukan terkait hal teknis dalam *sasi lompa* tentunya akan ditindak sesuai aturan yang telah ditetapkan. *Kedua*; *kewang* wajib memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. *Ketiga*; *sasi lompa* memiliki aturan dan penindakan hukum pada pelanggarnya, misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dalam mengambil ikan lompa sebagai umpan untuk memancing.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait pengelolaan *sasi lompa* di Negeri Haruku, meliputi dua mekanisme: (1) mekanisme formal pada tingkat kabupaten; dan (2) mekanisme informal masyarakat adat. *Pertama*; mekanisme formal berpedoman pada mekanisme yang berlaku nasional. Pilihan mekanisme ini dilakukan karena belum ada regulasi daerah tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran terhadap pengelola *sasi lompa*. Proses pengambilan keputusan melalui enam tahapan dan cukup panjang, melibatkan tujuh aktor utama. Walaupun tahapan prosesnya cukup jelas, namun mekanisme pengambilan keputusan seperti ini hanya satu kali dilakukan, dan umumnya terhenti di pihak penegak hukum. Pada tingkat implementasi, mekanisme ini tidak efektif karena rentang kendali koordinasi dan sistem pelaporan yang tidak efisien. *Kedua*; pengambilan keputusan secara informal oleh masyarakat adat, yakni partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan di Negeri Haruku. Mekanisme pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat melalui tahapan yang cepat, kekuatan hukum yang digunakan *kewang* adalah raja. Mekanisme pengambilan keputusan pada masyarakat adat memiliki enam tahapan yang melibatkan lima aktor dengan komunikasi yang cepat. Mekanisme ini digunakan sejak keputusan raja, dan mekanisme ini hanya empat kali digunakan hingga tahun 2018. Terdapat tiga tahapan keputusan adat yang menjadi pilihan untuk membangun efek jera di tingkat pelanggaran. Keputusan pertama adalah peringatan, jika terjadi pelanggaran oleh

pelanggar yang sama, maka diberikan peringatan kedua disertai surat resmi, dan bila pelanggaran dilakukan ketiga kalinya maka diberikan keputusan hukuman adat (denda sebesar Rp. 20.000, khusus untuk anak-anak dipukul sebanyak 5 kali). Dinamika pengambilan keputusan cukup tinggi di tingkat masyarakat adat. Walaupun demikian, mekanisme seperti ini masih membutuhkan koordinasi yang kuat dengan kelembagaan formal yang ada di Negeri Haruku. Efektivitas keputusan diduga belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera jika mekanisme ini tidak dijalankan secara reguler, walaupun masyarakat patuh terhadap aturan adat.

### Indikator Rencana Pengelolaan Sasi Ikan Lompa

Indikator rencana pengelolaan mengedepankan eksistensi Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) *sasi lompa* yang membuat berbagai aspek dalam pengelolaan *sasi lompa*, baik pihak-pihak terlibat, mekanisme kelembagaan dalam pengelolaan dan aspek perencanaan pengelolaan *sasi lompa*. RPP diharapkan menjadi petunjuk pelaksanaan

pengelolaan sumberdaya ikan dalam menjamin kesinambungan kegiatan *sasi lompa* di Negeri Haruku.

Indikator rencana pengelolaan *sasi lompa* memiliki skor 2 (Tabel 5). Hasil ini menjelaskan bahwa *sasi lompa* di Negeri Haruku memiliki RPP namun belum ditindak lanjuti. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian penuh dari pemerintah pusat tentang sumberdaya ikan di Negeri Haruku. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya RPP sebagai regulasi formal pada tingkat kecamatan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya petunjuk pasti tentang pengelolaan sumberdaya ikan, terutama ikan lompa. Pada sisi lain terkait pengelolaan, di Negeri Haruku masih dipertahankan kearifan lokal *sasi*, baik untuk pengelolaan kawasan secara umum maupun pengelolaan sumberdaya ikan secara khusus. Walaupun demikian, RPP yang bersifat informal ini belum sepenuhnya dilakukan. Pengelolaan perikanan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. (Tarigan *et al.*, 2019)

Tabel 4. Indikator mekanisme pengambilan keputusan

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor	Kondisi di Lapangan
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Sasi Ikan Lompa	Ada atau tidaknya mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa	Survei dilakukan dengan analisis dokumen antara lembaga dan analisis <i>stakeholder</i> melalui wawancara/kuesioner	tidak ada penegakan aturan	1	2
			ada penegakan aturan main namun tidak efektif	2	
			ada penegakan aturan main dan efektif	3	
			tidak ada alat dan orang	1	3
			ada alat dan orang tapi tidak ada tindakan	2	
			ada alat dan orang serta ada tindakan	3	
			tidak ada teguran maupun hukuman	1	3
			ada teguran atau hukuman	2	
			ada teguran dan hukuman	3	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 5. Indikator rencana pengelolaan

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor (1-3)	Kondisi di Lapangan
Rencana pengelolaan Sasi Ikan Lompa	Ada atau tidaknya RPP untuk wilayah pengelolaan Sasi Ikan Lompa dimaksud	Survei dilakukan dengan wawancara/kuisisioner: 1. Adanya atau tidak RPP di suatu daerah 2. Dilaksanakan atau tidak RPP yang telah dibuat	belum ada RPP;	1	2
			ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan;	2	
			ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya	3	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pelaksanaan *sasi* yang ditetapkan dengan menutup sebagian kawasan untuk pemanfaatan sumberdaya ikan tertentu belum mendapat perhatian serius dari masyarakat terhadap substansi pengaturan *sasi* dalam pengelolaan secara komperhensif. Hal ini terbukti dengan masih adanya kegiatan pemanfaatan pada kawasan *sasi*. Selain itu, adanya pemanfaatan sumberdaya ikan yang dilindungi seperti penyu. Dinamika kelembagaan pada indikator RPP masih diinisiasi oleh masyarakat. Implementasinya belum menunjukkan manfaat eksistensi RPP ditingkat masyarakat adat. Walaupun aturan adat memiliki posisi yang kuat, namun ketergantungan secara ekonomi terhadap sumberdaya ikan menjadi pemicu aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan substansi RPP. Mukminin *et al.* (2022) menemukan hasil penilaian pada indikator ini adalah rendah, padahal eksistensi RPP sangat menentukan keberhasilan pengelolaan *sasi lompa* secara berkelanjutan. Pilihan terbaik untuk membangun RPP adalah penggunaan sistem pengelolaan *sasi lompa* dengan pendekatan ekosistem. Pilihan ini sangat membantu lembaga pengelolaan *sasi lompa* mereduksi dampak yang kompleks.

#### Indikator Tingkat Sinergitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sasi Lompa

Tingkat sinergitas antar kebijakan dan lembaga merupakan keterpaduan gerak dan langkah antara kebijakan dalam pengelolaan *sasi lompa* sehingga tidak memunculkan konflik

kepentingan dan benturan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan *sasi lompa* ditentukan oleh sejauh mana sinergitas antar lembaga terkait pengelolaan *sasi lompa*. Tujuan indikator ini adalah mengetahui tingkat sinergi antara lembaga dan tingkat sinergi kebijakan dalam pengelolaan *sasi lompa* (NWG-EAFM, 2014).

Penilaian indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan *sasi lompa* (Tabel 6) memiliki skor 3 yang dibagi dalam dua bagian penjelasan. *Pertama*; lembaga-lembaga yang bekerjasama untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya ikan lompa di Negeri Haruku. Hal ini memungkinkan dapat berjalannya hubungan kerjasama yang baik antara lembaga adat dan lembaga yang lain. *Kedua*; adanya kebijakan saling mendukung yang dibuat antara lembaga-lembaga tersebut. Sejak tahun 2000-2018, pengembangan *sasi lompa* didasarkan pada komunikasi yang baik antar lembaga di tingkat kabupaten hingga di tingkat masyarakat. Partisipasi seluruh *stakeholder* cukup tinggi, namun terlihat ego sektoral yang kuat dalam implimentasinya. Kondisi ini disebabkan setiap lembaga/badan masing-masing memiliki rencana berbeda, dan belum ada integrasi program maupun kegiatan.

Kondisi tersebut turut memberikan pengaruh terhadap rumusan kebijakan. Masing-masing lembaga/badan memiliki kebijakan yang saling terpisah, beberapa diantaranya telah mengembangkan kegiatan pada kawasan dan lokasi yang sama, namun belum tergambar



sinergitasnya. Pendekatan terpadu pada setiap tingkatan lembaga merupakan alat dasar untuk pembuatan kebijakan dan pelaksanaan di seluruh sektor pada berbagai tingkat pemerintah dan kawasan, memungkinkan identifikasi kebijakan dan implementasinya sistematis, sinergi atau efisien. Abrahamsz *et al.* (2018) dalam penilaian EAFM menyatakan bahwa sinergisitas antar lembaga belum didukung dengan komunikasi yang efektif, namun pada tingkat kebijakan terindikasi saling mendukung. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerahnya secara berkelanjutan (Lestari&Satria, 2015).

### Indikator Kapasitas Pemangku Kepentingan

Kapasitas pemangku kepentingan mencakup upaya konstruktif peningkatan kapasitas oleh pemangku kepentingan. Pemangku *sasi lompa* adalah berbagai pihak

yang terkait secara langsung dalam pengelolaan *sasi lompa*. Pemangku *sasi lompa* dapat berasal dari birokrasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan organisasi masyarakat pesisir (NWG-EAFM, 2014). Indikator kapasitas pemangku kepentingan memiliki skor 2 (Tabel 7). Hal ini menjelaskan bahwa adanya pemangku kepentingan, walaupun tidak dijalankan sesuai fungsinya. Kondisi ini disebabkan belum ada perhatian penuh dari pemerintah pusat terkait *sasi lompa*. Efektivitas peningkatan kapasitas dalam pengelolaan *sasi lompa* sangat ditentukan oleh kebijakan yang diimplementasikan. Rehata *et al.* (2020) menemukan indikator kapasitas pemangku kepentingan tergolong buruk dan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan. Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu diatur dengan baik untuk mewujudkan tujuan strategis (Parera *et al.*, 2022).

Tabel 6. Indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor	Kondisi di Lapangan
Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan <i>Sasi</i> Ikan Lompa	Semakin tinggi tingkat sinergi antara lembaga maka tingkat efektivitas pengelolaan <i>Sasi</i> Ikan Lompa akan semakin baik	Survei dilakukan dengan dikumen antara lembaga dan analisis <i>stakeholder</i> melalui wawancara/kuesioner	konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan)	1	3
			komunikasi antar lembaga tidak efektif	2	
			sinergi antar lembaga berjalan baik	3	
	Semakin tinggi tingkat sinergi antar kebijakan maka tingkat efektivitas pengelolaan <i>Sasi</i> Ikan Lompa akan semakin baik	Survei dilakukan dengan dikumen antara lembaga dan analisis <i>stakeholder</i> melalui wawancara/kuesioner	terdapat kebijakan yang saling bertentangan	1	3
			kebijakan tidak saling mendukung	2	
			kebijakan saling mendukung	3	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 7. Indikator kapasitas pemangku kepentingan

Indikator	Definisi/ Penjelasan	Monitoring/ Pengumpulan	Kriteria	Skor (1-3)	Kondisi di Lapangan
Kapasitas pemangku kepentingan	Seberapa besar frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan <i>Sasi</i> Ikan Lompa berbasis ekosistem	Survei dilakukan dengan wawancara/kuisisioner terhadap : 1. adanya atau tidak, berapa kali 2. Materi	tidak ada peningkatan	1	2
			ada tapi tidak difungsikan	2	
			ada dan difungsikan	3	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Efektivitas dan tidaknya proses peningkatan kapasitas sangat ditentukan oleh proses pembelajaran pada tiga aspek yaitu pembelajaran antar individu, antar disiplin dan antar tipe pengetahuan (Haapasari *et al.*, 2012 dalam Abrahamsz & Wurlianty, 2015). Abrahamsz *et al.* (2018), menemukan implikasi pengembangan kelembagaan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, penetapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan, serta penguatan manajemen kelompok dan kemitraan. Puansalaing *et al.* (2021) mengusulkan bahwa peningkatan sinergitas kebijakan dan kelembagaan serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan sebagai langkah penting dalam pengembangan kelembagaan pengelola. Ramdhani *et al.* (2019) menyatakan strategi advokasi terhadap kesadaran krisis perikanan dan eksistensi data perikanan menjadi kebutuhan penting.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penilaian terhadap domain kelembagaan *sasi lompa* di Negeri Haruku memperlihatkan bahwa indikator tingkat kepatuhan terhadap prinsip perikanan yang bertanggung jawab masih kurang, sedangkan indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan tergolong sedang. Sementara indikator mekanisme kelembagaan pengelolaan perikanan sangat bervariasi, indikator rencana pengelolaan perikanan tergolong sedang, indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan sangat

baik, dan indikator pemangku kepentingan tergolong sedang.

Beberapa saran yang direkomendasikan untuk mendukung penguatan kelembagaan *sasi* meliputi: peningkatan sinergitas pemerintah daerah, pemerintah negeri negeri, lembaga dan masyarakat adat, yang didukung stakeholder seperti akademisi. Penguatan naskah akademik untuk peningkatan nilai komposit pada analisis EAFM sebagai dasar pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Penegakan hukum lebih diefisienkan dengan mengakomodir hukum adat atau non formal yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J. dan Wurlianty B. 2015. Dinamika Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Konsuden Kabupaten Seram Bagian Timur. *Symposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Hal: 379-393.
- Abrahamsz, J., Makailipessy, M.M., dan Thenu, I.M. 2018. Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di Ohoi Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 10(1): 53-61. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.53-61>.
- Achmadi dan Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alvayedo, M.B. dan Erliyana, A. 2022. Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa *Sasi* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal*

- Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6(3): 9730-9739. DOI: [10.36312/jisip.v6i3.3220/](https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3220/)
- Arias, A. and Sutton, S. G. 2013. Understanding Recreational Fishers' Compliance with No-take Zones in The Great Barrier Reef Marine Park. *Ecology and Society* 18(4):18. <http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss4/art18/>
- Asrul, Rindarjono, M.G., Sarwono. 2017. Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013. *Jurnal GeoEco* 3(1): 69-81.
- Gaichas, S.K. 2008. A Context of Ecosystem Based Fisheries Management: Developing Concepts of Ecosystem and Sustainability. *Marine Policy* 32(3): 393-401. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2007.08.002>
- Garcia, S.M., Zerbi, A., Aliaume, C., Do Chi, T. & Lasserre, G. 2003. *The Ecosystem Approach to Fisheries. Issues, Terminology, Principles, Institutional Foundations, Implementation and Outlook*. FAO Fisheries Technical Paper. No. 443. Rome, FAO.
- Gazali, M. 2019. Kajian Domain Kelembagaan Pada Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil Dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Aceh Barat (Studi Kasus PPI Kuala Bubon). *Jurnal La'ot* 1(1): 45-56. DOI: <https://doi.org/10.35308/jlaot.v1i1.1074>.
- Karepesina, S.S., Susilo, E., Indrayani, E. 2013. Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa haruku Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal ECSOFiM* 1(1): 25-40.
- Kusumadinata, A. 2015. Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara). *Jurnal Sosial Humaniora* 6(1): 23-32.
- Lestari, E. dan Satria, A. 2015. Peranan Sistem Sasi Dalam Menunjang Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat. *Buletin Ilmiah Marina Sosek Kelautan dan Perikanan* 1(2): 67-76.
- Mukminin, A., Indra, Sarong, M.A. 2022. Analysis of Spiny Lobster Fishery Sustainability The Using Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Pulo Aceh. *Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan* 11(1): 68-75. doi: [10.13170/depik.11.1.24035](https://doi.org/10.13170/depik.11.1.24035).
- Mulyana. 2018. Penilaian Indikator EAFM di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Mina Sains* 4(1): 1-10.
- Ninef, J.S.R, Adrianto, L., Dahuri, R., Rahardjo M.F., Adhuri D.S. 2019. Strategi Pengelolaan Perikanan Skala Kecil dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 14(1): 47-57. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i1.6983>.
- NWG-EAFM. 2014. *Modul Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management)*. Nasional Working Group on EAFM, Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Parera, E., Purwanto, R.H., Permadi, D.B., Sumardi. 2022. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Peranan Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil* 6(1): 34-43. DOI: 10.30598.jhppk.2022.6.1.34
- Persada, N.P.R., Mangunjaya, F, M., Tobing I.S.L. 2018. Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu dan Budaya* 41(59): 6869-6900.
- Puansalaing, D.M., Budiman, J., Bonek, F.B., Makapedua, D.M., Lasut, M.T., Ngangi, E.L.A., Sumilat, L.A., Darmono, O.P. 2021. Management of Scad Fisheries (*Decapterus* spp.) in Sulawesi Sea Waters, North Sulawesi Province, Using EAFM. *Aquatic Science & Management* 9(1): 7-16. <https://doi.org/10.35800/jasm.9.1.2021.32468>.
- Puspasari, Wudianto, Fauziah, R. 2014. Penerapan EAFM Dalam Pengelolaan Perikanan Malalugis (*Decapterus macarellus*) di Perairan Laut Sulawesi. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 6(1): 29-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.6.1.2014.29-36>
- Ramdhani, F., Nofrizal., Jhonnerie, R. 2019. Studi Hasil Tangkapan Bycatch dan Discard Pada Perikanan Udang Mantis (*Harpiosquilla raphidea*) Menggunakan Alat Tangkap Gillnet. *Marine Fisheries* 10(2): 129-139. <https://doi.org/10.29244/jmf.v10i2.29496>.
- Rehata BM, Kamal MM, Boer M, Fahrudin A, Zairion. 2020. Strategi Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil Dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. *Journal of Natural Resources and*

*Environmental Management* 10(3): 446-460.

<http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.446-460>.

- Renjaan, M.J., Purnaweni, H., Anggoro, D.D. 2013. Studi Kearifan Lokal *Sasi* Kelapa Pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 11(1): 23-29.
- Tarigan, D.J., Simbolon, D, Wiryawan, B. 2019. Evaluasi Keberlanjutan Perikanan Gurita Dengan Indikator EAFM (Ecosystem

Approach to Fisheries Management) di Kabupaten Banggai Laut., *Marine Fisheries* 10(1): 83-94.

- Yusuf, D., Arief, A.A., Amiluddin, Ali, S.A., Indar, M.Y.N. 2018. Analisis Peran Kelembagaan Lokal Nelayan dan Strategi Pengembangannya Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Telur Ikan Terbang di Kabupaten Polman Sulawesi Barat. *Jurnal Akuatika Indonesia* 3(1): 1-9.